

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi merupakan bagian dari transisi demokrasi yang mencakup liberalisasi politik dan demokratisasi. Dalam tahap ini terjadi perubahan rezim serta meluasnya hak-hak politik rakyat. Muncul pula ledakan partisipasi politik yang ditandai dengan dilaksanakannya pemilu demokratis dan pergantian pemerintahan sebagai konsekuensi dari pemilu. Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter¹ juga menambahkan, transisi demokrasi sering menimbulkan situasi ketidakpastian. Dalam banyak kasus, situasi itu dapat menjadi peluang bagi munculnya kekuatan status quo maupun gerakan-gerakan arus balik demokratisasi.

Ledakan partisipasi politik dan transisi demokrasi telah menciptakan perubahan besar dalam lingkup politik dan kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi “digenggam” secara absolute oleh militer namun telah beralih ke tangan para politisi sipil. Perubahan itu membawa implikasi yang sangat berarti bagi institusi kepartaian. Perubahan dalam lembaga-lembaga kenegaraan sebagaimana tertuang dalam amandemen UUD 45, menempatkan partai sebagai institusi penting dan memiliki peran strategis dalam struktur politik di Indonesia.

Pada masa reformasi banyak partai baru yang bermunculan dari berbagai kalangan dan perwakilan serta azas. Secara kuantitatif, menjelang Pemilu 1999

¹Guillermo O'Donnell and Philippe C. Schmitter. *Transitions From Authoritarian Rule; Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*. Baltimore; John Hopkins University Press, 1986. Hal-56

tak kurang dari 141 partai telah didaftarkan di Departemen Kehakiman. Sebanyak 106 diantaranya kemudian mendaftar ke Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) untuk menjadi kontestan Pemilu 1999. Namun pada tahap seleksi berikutnya, hanya 60 partai yang memenuhi syarat untuk verifikasi. Dari jumlah itu, P3KPU memutuskan hanya 48 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 1999.² Jumlah partai politik peserta pemilu itu menurun pada tahun 2004 menjadi 24 partai politik, dan jumlah partai politik peserta pemilu bertambah lagi pada pemilu 2009 menjadi 38 partai politik.³ Tak hanya melahirkan partai politik baru, masuknya politisi sipil di percaturan partai politik membuat aktor-aktor yang bermain di dalamnya pun beragam, mulai dari artis, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan purnawirawan militer.

Namun, banyaknya partai baru itu tidak kemudian berbanding lurus dengan akselerasi demokratisasi dan kualitas demokrasi. Begitu juga multi actor menjadi tokoh utama dalam percaturan politik di tiap pemilu, tak mampu mendongkrak kualitas demokrasi dan kualitas kepemimpinan yang berujung pada kesejahteraan bangsa dan Negara. J. Kristiadi mengemukakan, banyak diantara partai baru itu lebih tepat disebut sebagai gerombolan politik daripada partai politik. Disebut demikian karena partai-partai baru itu sangat pragmatis dan sangat “lapar” terhadap kekuasaan daripada secara serius memperjuangkan demokratisasi dan reformasi di Indonesia. Partai-partai itu juga tidak memiliki ideologi dalam arti sebenarnya sebagai gugusan nilai yang diyakini sebagai cita-cita politik dan

² Salomo Simanungkalit (Ed). *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2002, hal; 185-189.

³ Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia

menjadi pijakan pergerakan partai. Ideologi tereduksi menjadi sekadar rangkaian kata-kata indah dalam anggaran dasar.⁴

Pemerintahan orde baru yang dikenal dengan pemerintahan militeris berganti menjadi pemerintahan reformasi. Pada masa reformasi ini, yakni pemilu 1999, pemenang kontes pemilihan presiden Republik Indonesia keempat dimenangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa dalam Sidang Umum (SU) MPR.⁵

Kemenangan Gusdur ini membawa perubahan sekaligus pengaruh besar dalam partisipasi politik masyarakat. Terutama kiai, kiai sebagai elemen masyarakat yang secara status social memiliki kesamaan dengan Gusdur—kiai juga, yang dipandang sebagai sosok yang suci, pewaris ajaran nab dan segala tindak tanduknya harus diikuti. Kedudukan istimewa para kiai itu merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan secara optimal dalam politik. Dengan pemahaman keagamaan yang dimiliki para kiai itu, masyarakat beresumsi bahwa keberadaan kiai dalam politik dapat membantu “membersihkan” citra politik yang kotor sehingga hasil-hasil dari proses politik itu dapat memberikan manfaat pada umat secara lebih baik.

⁴ J. Kristiadi. *Kehidupan Kepartaian di Indonesia*. Makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Seminar politik pada acara Deklarasi Partai Pergerakan Kebangsaan, Semarang 2006.

⁵ Dalam pemilihan presiden, Gus Dur mengalahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri, partai yang berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPR RI (153 kursi) pada pemilu 1999. Dalam perjalanan politiknya, PKB mampu memperoleh dukungan rakyat dalam jumlah yang cukup signifikan. Pemilu 1999 menempatkan PKB pada urutan ketiga perolehan suara tingkat nasional setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar dengan jumlah pemilih sebesar 13.336.982 (12,6%). Hanya saja dalam perolehan kursi DPR RI, PKB hanya menduduki posisi keempat dengan meraih 51 kursi. Jumlah itu masih dibawah “seteru” politiknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 58 kursi.

yang dapat dijadikan rujukan bagi umat untuk menentukan sikap, narasi lebih banyak dilatarbelakangi oleh motif kalkulasi politik sebagai bagian dari politik dagang sapi.

Berpijak pada teori perilaku Edward Ross⁶, dapat dimungkinkan terjadi perubahan perilaku para kiai yang jauh berbeda jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemuka agama. Perubahan itu terjadi ketika para kiai mengalami pergeseran situasi pada saat berperan dalam ranah politik.

Hal-hal itulah apa yang dikemukakan oleh J Kristiadi—yang menyebabkan elektabilitas partai politik menurun. Ini bisa dilihat dari partai-partai yang ditunggangi kiai. Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, partai yang secara structural terdapat banyak kiai mendudukinya, dalam skala nasional elektabilitasnya menurun, terlihat jelas pada perolehan suara di pemilu 2004 mencapai 11.989.564 suara (10, 57 %) dan 52 kursi. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 1.347.418 suara (10%) dari jumlah sebelumnya, pemilu tahun 1999 (13.336.982 suara atau 12.61%, 51 kursi) Dan pada pemilu 2009 mendapatkan 5.146.122 (4.94%) dan 27 kursi.⁷

Sementara Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 11.329.905 suara (10.71 %) dan 58 kursi pada tahun 1999, turun menjadi 9.248.764 suara (8.15 %) atau 58 kursi di tahun 2004, dan turun drastis pada tahun 2009 menjadi 5.533.214 suara (5.32 %) atau 37 suara.

⁶ Edward Ross, *Social Psychology: An Outline and Source Book*, Madison: The Macmillan Company, 1908. Hal 215.

⁷Modul_1d, diakses dari www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf, diakses tgl 10 januari 2014, jam 19.52 WIB

Ternyata perolehan suara tentunya elektabilitas partai politik mengalami pergeseran di daerah-daerah, Sumenep misalnya. Kabupaten Sumenep Madura yang mempunyai komposisi penduduk islam yang sangat kuat menjadi kekuatan politik yang paling menentukan terhadap hasil pemilu. Santri yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat sumenep telah menunjukkan hasil yang maksimal pada pemilu tahun 1999, Tetapi santri tidak bisa mengulangi sukses pada pemilu sebelumnya pada tahun 2004 dan 2009 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel : 1.1

Perolehan suara dan kursi legislatif Kab. Sumenep

No	Partai Politik	Perolehan suara			% perolehan suara			Perolehan Kursi legislatif		
		1999	2004	2009	1999	2004	2009	1999	2004	2009
1	PKB	376,057	258,905	125,393	50%	49,2	25,5	25	20	11
2	PPP	50.000	87,600	60,647	5%	16,6	12,4	4	7	7

*KPU Kabupaten Sumenep

Berdasarkan tabel diatas, perolehan suara PKB dan PPP Jika di korelasikan dengan dengan hasil pemilu pada 1999 sampai 2009 telah terjadi penurunan yang sangat drastis terhadap perolehan suara partai politik di kabupaten sumenep, ini menjadi bukti atas semakin mudarnya kekuatan politik santri di kalangan masyarakat kabupaten sumenep, yang mana islam menjadi pioner dengan

santrinya yang lulusan pondok pesantren yang lebih banyak berafiliasi dengan partai berbasis islam, dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen PKB dan PPP.

Pasang surut Dinamika politik kaum santri di Madura (sumenep), menjadi bagian penting dari tugas ilmu sosial, khususnya Ilmu politik. Pasca reformasi menjadi era pasang-surut bagi kehidupan politik kaum santri di Sumenep, karenanya minat penulis sebagai insan akademis turut serta ingin menunaikan kewajiban memahami dengan menganalisa dan mempelajari lebih dalam sekian peristiwa politik. Penulis hendak menjelaskan dan mengurai anasir-anasir historis dan ideologis kaum santri dalam prosesnya berlabuh ke arena politik praktis dari menjadi partisipan politik hingga menduduki jabatan politik di struktural partai atau di jabatan publik lainnya. Fenomena politik hari ini mengantar kita semua pada satu pemahaman bersama bahwa kekuatan politik santri kini mengalami envolusi, berkurangnya sejumlah kursi di parlemen kenyataan tak terbantah bahwa partai-partai berbasis ormas Islam (Nahdatul Ulama) berada di titik dekaden, merupakan studi yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dalam kaitannya dengan penelitian ini, setidaknya ada 3 permasalahan yang ingin di cari oleh peneliti.

1. Apakah motivasi keterlibatan santri dalam politik praktis baik secara ideologi maupun historis ?

2. Bagaimanakah pergeseran politik santri pada Partai Kebangkitan Bangsa ke Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten sumenep pada pemilu 1999, 2004, dan 2009 ?
3. Faktor-faktor apa sajakah berpengaruh terhadap pergeseran politik santri di Kabupaten Sumenep dan apa saja dampaknya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang peran santri dalam politik di kabupaten sumenep yang semakin memudar, Yang mana pemilu pertama pasca bergulirnya orde reformasi santri menjadi kekuatan politik yang sangat kuat di kabupaten sumenep hal ini yang dibuktikan dengan kesuksesan PKB dalam meraih suara mayoritas kursi DPRD sehingga mencapai 25 % tetapi setiap pemilu terus mengalami penurunan suara yang berdampak terhadap perolehan kursi DPRD.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk memahami motivasi kiai terlibat ke dalam politik praktis, baik secara ideologi maupun historis.
2. Untuk mengetahui pergeseran politik santri Partai Kebangkitan Bangsa ke Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sumenep
3. Untuk mengetahui faktor dan dampak pergeseran politik santri Partai Kebangkitan Bangsa ke Partai Persatuan Pembangunan.

Pencapaian tujuan diatas menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan terhadap penelitian “ Memudarnya Politik Santri Di Kabupaten Sumenep (Analisa Penurunan Suara PKB dan PPP).

2. Manfaat

Sementara itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Memberikan masukan kepada pembaca atau masyarakat yang tertarik ingin mempelajari dan memahami tentang memudarnya politik santri di kabupaten sumenep. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap pamor santri sebagai sayap partai dalam merebut hati rakyat dalam pemilu yang sudah mulai menurun.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat memahami peran santri dalam politik yang sudah kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga munculnya referensi kecenderungan pemilih terhadap politisi dari partai golongan abangan.

Dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berminat untuk lebih dalam tentang politik santri.

D. Kerangka Teori

Untuk memahami lebih lanjut mengenai uraian di atas, maka penulis menggunakan landasan teori. berikut ini merupakan definisi teori menurut Kerlinger, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi

yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena⁸.

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu, teori selalu memaknai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia dan arena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan⁹.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka berikut ini merupakan landasan dasar penelitian menggunakan teori-teori sebagai berikut.

1. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) sebagai suatu media dalam memilih pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi. Dengan pemilu diharapkan menjadi representasi dari rakyat karena pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan di akulturasikan menjadi kebijakan.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan di pergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pemilihan umum mengimplikasikan terciptanya pemerintah secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat

⁸Sugiyono, memahami penelitian kualitatif. Alfabeta, Bandung, 2005, hal 14

⁹Budiarjo Miriam, dasar-dasar ilmu politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993, Jakarta, Hal 30

madani. Dengan pemilu diharapkan masyarakat memiliki daya kritis yang tinggi dan memilih yang terbaik berdasarkan keyakinannya.

Menurut Harris G dan kawan-kawan bahwa pemilu adalah:

*“ elections are the occasions when citizens tell their officials and decide, what they want the government to do in making these decisions citizens determine what rights they want to have and keep ”*¹⁰

Pendapat di atas pada intinya adalah Dalam demokrasi modern masyarakat berhak atau berkesempatan memilih calon anggota legislatif yang akan mewakilinya di parlemen, yang mana anggota legislatif tersebut merupakan representasi atas keterwakilan rakyat yang akan memproses aspirasi masyarakat. Pemilihan umum merupakan proses penyerahan sementara hak politik masyarakat. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan pemerintahan negara¹¹.

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan konsekuensi logis diadanya sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mulai digulirkan sejak runtuhnya orde baru. Dalam sistem demokrasi setiap warga negara punya hak aktif dalam proses politik karena subyek pokok suksesnya demokrasi adalah terciptanya partisipasi aktif rakyat.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan pengejawantahan dari UUD 1945 yaitu diharapkan terciptanya kedaulatan rakyat. Secara yuridis, pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam pasal 22 E UUD 1945 yang menyebutkan :

¹⁰Harris G. Warren, dalam Harianto, partai politik untuk tujuan umum, 1998, liberty, Yogyakarta, Hal- 81

¹¹Miriam Budiarto, *hak asasi manusia dalam dimensi global*, jurnal ilmu politik no 10, 1990, Jakarta, hlm 37

1. Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, teta, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹²

b. Sistem Kepartaian

Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai dan sistem banyak partai¹³. Namun dalam perkembangannya, konsepsi sistem partai tunggal masih dapat digolongkan kembali berdasarkan jumlahnya, yaitu partai tunggal totaliter dengan satu partai yang berkuasa penuh seperti yang diterapkan pada negara komunis ataupun fasis, partai tunggal dominan yang didalamnya terdapat lebih dari satu partai tetapi ada satu partai besar yang menguasai secara dominan seperti di Jepang, serta yang terakhir adalah bentuk sistem partai tunggal yang tanpa partai sebagaimana

¹²UUD 1945

¹³Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. hlm. 158.

diterapkan dalam sistem politik Otokrasi Tradisional seperti di Brunei Darussalam dan Arab Saudi¹⁴.

Di Indonesia pasca berakhirnya orde baru dan memasuki orde reformasi memasuki babak baru dalam sistem kepartaian di Indonesia dengan sistem multi partai seiring disahkannya UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik yang dikeluarkan oleh pemerintahan presiden B.J. Habibie menjadi tanda tentang dibukanya keran politik warga negara untuk berpartisipasi langsung sehingga efeknya jumlah partai peserta pemilu pada tahun 1999 menjadi 49 partai dari 141 partai yang mendaftar, Sedangkan pada tahun 2004 peserta pemilu menjadi 24 partai dari 128 partai yang mendaftar dan pada tahun 2009 peserta pemilu menjadi 38 partai politik yang mengikuti pemilu.¹⁵ Hal ini sangat berbeda dengan masa orde baru yang diikuti oleh tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Golongan Karya.

Dalam sistem multi partai diimbangi dengan adanya pembatasan partai politik yang berhak mengikuti pada pemilu selanjutnya yang dikenal dengan metode *electoral threshold (ET)*. Dalam pemilu tahun 1999 yang diatur dalam UU No 3 Tahun 1999 mengatur bahwa Partai Politik yang berhak mengikuti pemilu berikutnya adalah Partai Politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai Politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan syarat bergabung dengan partai lain atau membentuk partai politik baru. Pemilu 1999 menghasilkan lima partai politik

¹⁴Ramlan Surbakti, *Ibid*, hlm. 159.

¹⁵Keputusan KPU 2009

yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia dan berhak mengikuti pemilu selanjutnya, partai tersebut adalah PDI-P, PKB, PAN, P. Golkar, dan PPP.

Penentuan besaran ambang berlanjut pada pemilu selanjutnya dengan mengalami peningkatan menjadi 3% untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2009 sebagaimana diatur dalam UU No 13 tahun 2003¹⁶. besaran ambang batas tersebut menjadikan partai politik peserta pemilu 2004 menjadi 24 partai dan hanya tujuh partai politik yang berhasil lolos ambang batas tersebut yaitu P. Demokrat, PDI-P, P. Golkar, PKB, PAN, PPP, PKS.

Berdirinya partai politik baru menjadi bukti semakin demokratisnya perpolitikan Indonesia, hal ini menjadi indikator atas berhasilnya sistem demokrasi di Indonesia. Dengan berdirinya partai politik yang semakin menjamur dapat memberikan referensi terhadap masyarakat untuk memberikan alternatif dalam memberikan aspirasi politiknya terhadap partai yang dianggap dapat mewakilinya.

2. Perilaku Politik

a. Pengertian Perilaku Politik

Sebelum membahas tentang perilaku politik kita harus paham tentang pengertian perilaku terlebih dahulu. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme yang bersangkutan dengan tingkah laku dalam bermasyarakat.

Sedangkan politik adalah secara etimologi politik berasal dari "*polis*" yang berarti negara kota, dengan politik, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan,

¹⁶Pasal 9 UU No 13 Tahun 2003

kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa arab disebut "*siyasa*" yang kemudian di tererahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya "*politics*". Politik itu cerdas dan bijaksana dalam membicarakan sehari-hari kita seakan-akan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan¹⁷.

Menurut Ramlan Surbakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu¹⁸. Dalam hal ini politik tidak terlepas dari pemerintah, masyarakat dan kebijakan yang akan di terapkan dalam kehidupan bernegara, politik menjadi alat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai tetapi juga tidak bisa terlepas dari berbagai cara dalam melaksanakan politik itu, bisa dengan cara yang baik tetapi juga bisa menjadi tipu muslihat untuk membohongi yang di perintah oleh pemerintah itu sendiri. Politik menjadi cabang ilmu baru yang mengedepankan interaksi kehidupan bernegara.

Sedangkan aristoteles (384-322 SM) melihat politik sebagai keterdorong alami dan tidak dapat dihindari manusia. Usaha memaksimalkan kemampuan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian kehidupan politik adalah sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara (state), kekuasaan

¹⁷Inu kencana syafie, Azhari, SSTP, sistem politik indonesia, refika aditama, cet-6, 2010, Bandung, Hal-6

¹⁸Surbakti ramlan, memahami ilmu politik, gramedia widia sarana indonesia, 1991, jakarta, hal-1

(power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)¹⁹.

Menurut muhaimin iskandar, “ politik bukan melulu kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan negara dan masyarakat, lebih dari itu merupakan kegiatan dengan mana konflik sosial di artikulasikan dan meskipun tidak selalu berhasil dicari pemecahannya. “esensi politik adalah fungsi, arena ia berkaitan dengan hal ihwal mencari, mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan”. Secara praktis, politik adalah soal siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara bagaimana²⁰.

Jadi perilaku politik merupakan perilaku yang telah menjadi bagian kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan dari manusia lain ataupun dari masyarakat luas. Hubungan ini menjadi alasan utama dalam menarik simpati masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan mendukung partainya untuk meraih hasil yang maksimal dalam pemilihan umum.

b. Jenis-jenis Perilaku Politik

Menurut Smith ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku politik:

1. Otoritas dogmatis atau kebenaran yang bersifat mutlak

¹⁹<http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08/definisi-atau-pengertian-politik.html> diakses tgl 10-06-13, jam 11.21 wib

²⁰A.Muhaimin Iskandar, menggerakkan roda partai dan perubahan sosial di tingkat basis: modal pendidikan dasar politik tingkat anak cabang sistem kaderisasi partai kebangkitan bangsa: Jakarta : DPP PKB, 2000, hal 34

Otoritas dogmatis dalam Islam sangat kuat. Kebenaran Islam diyakini mutlak, universal dan tidak dapat diubah. Wahyu al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah wahyu terakhir untuk menuntun kepentingan hidup seluruh umat manusia.

2. Otoritas terarah atau ketuntasan pengaturan

Otoritas terarah yang merupakan seperangkat aturan komprehensif yang harus ditaati oleh umat Islam, terdapat dalam syari'ah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa syari'ah lebih luas daripada sekedar sistem hukum. Ia merupakan katalog komprehensif perintah-perintah dan aturan-aturan Allah untuk membimbing umat Islam. Cakupan syari'ah begitu luas yang meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan masyarakatnya.

3. Pelembagaan otoritas, atau pepaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperbaiki struktur keagamaan.

Pelembagaan otoritas adalah adanya hirarki kepemimpinan yang terorganisasi dalam Islam yang akan mengawal pelaksanaan dan berlakunya syari'ah. Dalam Islam, organisasi hirarkial keagamaan seperti yang dimiliki gereja tidak ada, oleh karena itu kelembagaan seperti ini diserahkan kepada umat atau negara. Dalam hal inilah kemudian muncul jargon politik yang dikemukakan oleh sejumlah gerakan Islam bahwa Islam adalah *din wa al-daulah*.²¹

Perilaku politik dibagi menjadi beberapa 6 jenis, antara lain :

²¹ Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, 1985, Rajawali Press, Jakarta, hal.224

1. Radikal, yaitu jika perwujudan dari suatu perilaku politik menjadi kecenderungan untuk adanya perubahan yang bersifat mencasur dan prinsipil.
2. Liberal, yaitu perwujudan dari perilaku politik bersifat bebas, sesuai dengan hukum dan akal sehat.
3. Moderat, merupakan suatu perilaku politik lebih bersifat menghindarkan diri dari tindakan atau perilaku ekstrem, mempunyai kecenderungan kearah tengah serta mampu untuk melakukan pertimbangan terhadap berbagai pandangan orang lain
4. Status Quo, merupakan perilaku politik yang di terapkan oleh individu atau kelompok, yang mempunyai kecenderungan untuk menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan politik negara dan ingin menjaga serta melestarikan suatu sikap politik tersebut.
5. Reaksioner. merupakan suatu perilaku politik yang mempunyai kecenderungan untuk menentang segala bentuk kemajuan maupun pembaharuan.
6. Konservatif, merupakan suatu perilaku politik yang berusaha melestarikan apa yang ada dan hanya mau menerima sedikit bentuk perubahan²².

Dengan demikian , secara umum bahwa perilaku politik dapat diartikan sebagai upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang di kehendaki. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik

²²<http://aahifis29.blogspot.com/2011/07bidang-bidang-kajian-ilmu-politik.html>. diakses tgl 4 juni 2013, jam 10.00 wib

menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan selain itu juga bisa memahami bentuk kepemimpinan yang ditunjukkan oleh santri setelah menjadi anggota legislatif dari yang sebelumnya penuh kesantunan.

3. Budaya Politik

a. Pengertian Budaya Politik

Berbicara masalah budaya politik yang mana tidak akan pernah lepas dari kebiasaan dan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggara administrasi, penyelenggara pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat di dalam kehidupannya.

Sebelum membahas tentang budaya politik lebih jauh, sebelumnya kita harus memahami tentang budaya itu sendiri. Budaya dipandang secara etimologi berasal dari akar kata “*budi*” dan “*daya*” yang berarti cahaya atau sinar yang terletak di dalam batin manusia. Perkataan “*daya*” berkaitan upaya atau usaha, keaktifan manusia melakukan dengan anggotanya apa yang digambarkan oleh budinya²³.

Jadi istilah kebudayaan merujuk pada dua proses utama yaitu internal dan eksternal, proses internal bersumberkan budi atau kecerdikan akal yang menjaga proses eksternal yang bersaskan daya atau tenaga manusia sebagai momentum dalam mengatur urusan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, kebudayaan

²³Sutan takdir alisjahbana (1982), *perkembangan sejarah kebudayaan indonesia pilihan dari jurusan nilai-nilai*, cet ke-3, jakarta, PT.Dian Rakyat

adalah hasil interpretasi akal manusia dalam memenuhi keperluan dan a .tivities hidupnya.

Merujuk pada Gabriel Almond dan Sidney Verba yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa budaya politik adalah suatu sikap terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara dalam sistem politik tersebut. Budaya politik indonesia yang penting adalah keyakinan, simbol dan nilai yang berasal dari budaya dan tradisi masing-masing komunitas bangsa indonesia. Unsur budaya politik inti masih memiliki tempat yang tinggi dalam tingkah laku politik indonesia dengan berbagai variasi intensitas dan kombinasi²⁴. Sedangkan menurut **Denis Kavanagh** budaya politik adalah sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung²⁵.

Budaya politik yang berkembang di indonesia sangat beragam, perbdaan kultur dan keragaman masyarakat indonesia telah memunculkan tipe dan corak tersendiri. Menurut clifford Geertz budaya politik yang di peragakan oleh masyarakat jawa terbagi menjadi tiga golongan, antara lain :

1. Budaya Politik abangan

Budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek animisme. Tradisi selamatan merupakan ciri has dengan masyarakat dengan budaya politik abangan, budaya ini dilakukan dengan upacara

²⁴Sanit, A., *pembaruan mendasar partai politik : menggugat partai politik*, 2003, Lab. Ilmu Politik, Fisip UI, Jakarta.

²⁵Zefrydts.blogspot.com/2013/01/budaya-politik.html?m=1. diakses tgl 13 januari 2014, jam 09.17 wib

selamatan dengan maksud untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia. Kelompok masyarakat yang dimaksud dengan kategori abangan adalah golongan petani. Kelompok masyarakat ini pada tahun 60-an seringkali berafiliasi dengan PKI dan PNI. Sedangkan pada masa sekarang partai yang masih menganut sistem abangan dan pola gerakannya cenderung memperjuangkan nasib petani sering kali dipertontonkan oleh PDIP dan Gerindra.

2. Budaya Politik Santri

Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama islam. Masyarakat santri biasanya diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama islam. Pendidikan masyarakat santri ditempuh melalui lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren, madrasah, atau masjid. Pekerjaan masyarakat dengan budaya politik biasanya adalah pedagang. Pada masa lalu kelompok masyarakat santri cenderung berafiliasi dengan PKB, PPP, PKS, dan partai yang berbasis islam lainnya.

3. Budaya Politik Priyayi

Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Kelompok priyayi adalah kelompok masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat. Pekerjaan kaum priyayi biasanya adalah birokrat. Kelompok masyarakat priyayi ini biasanya berafiliasi dengan Partai Golkar.²⁶

²⁶Geertz Clifford, *agama jawa (abangan, santri dan priyayi) dalam kebudayaan jawa*, 2013, cet-1, depok, komunitas bambu

Tipe budaya politik yang digagas oleh Clifford Geertz sesuai dengan kultur masyarakat Kabupaten Sumenep Madura tentang kepatuhannya terhadap kiai dan santri. Madura yang secara umum merupakan tempat peredaran umat Islam dan pondok pesantren telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir dan sikap politik masyarakatnya.

b. Hubungan Kiai dengan Santri

Menurut Pendapat Nurcholis Madjid bahwa Kyai berarti tua, pernyataan yang biasa digunakan orang Jawa untuk memanggil kakeknya yaitu “yahi” sedangkan pada nenek perempuannya dipanggil “nyahi”. tetapi terkandung rasa pensucian dan penghormatan kepada yang tua sebagaimana kecenderungan itu umum di kalangan orang Jawa. Sehingga “kyai” tidak saja berarti “tua” (yang kemudian sejalan dengan pengertian “*syekh*” dalam bahasa Arab), tetapi juga berarti sakral, keramat dan memiliki kemampuan²⁷.

Secara umum di Indonesia kyai dimaksudkan untuk para pendiri pesantren, yang sekaligus sebagai muslim pelajar yang telah membaktikan diri kepada Allah SWT dan menyebar luaskan serta memperdalam ajaran-ajaran Islam melalui kegiatan pondok pesantren²⁸.

Santri adalah sebutan bagi siswa yang belajar mendalami agama di pesantren dan tinggal di pondok yang berupa asrama. Dan disana mereka dituntut

²⁷Madjid Nurcholis, Bilik-bilik pesantren, hal 20

²⁸Imron Arifin, kepemimpinan kyai, kasus pondok pesantren Tebuireng, 1993, Kalimasaheda Press, Malang, Hal-14

hidup mandiri dan juga belajar tanpa terikat waktu dan juga mengimakan beribadah kepada Allah SWT²⁹.

Seiring dengan kemenangan ketua PBNU pada pemilihan umum presiden tahun 1999 telah mendorong politisi NU untuk menjadikan PKB dan PPP sebagai partai yang berbasis islam sebagai wadah perjuangan politiknya. Sejalan dengan berubahnya sistem pandangan politik baru dari sentralistik menjadi desentralistik telah membuka keran figur lokal untuk berpartisipasi langsung dalam politik.

Dengan munculnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membuka elit lokal untuk berpartisipasi langsung dalam pertarungan politik yaitu kyai, yang sebagian besar berafiliasi dengan PKB dan PPP. Hal ini menarik terhadap santri untuk mendukung kyai yang mencalonkan diri dalam pesta politik sebagai bentuk pengabdian terhadap gurunya.

Model hubungan kyai dengan santri yaitu persaan hormat dan kepatuhan yang bersifat mutlak dan berlaku seumur hidup sebagai bentuk pengabdian murid terhadap guru. Hal ini harus ditunjukkan oleh seorang sebagai murid dalam setiap aspek kehidupannya. Karena melupakan dengan guru yang telah mengajari ilmu keagamaan adalah bentuk kejelekan dan tidak mendapatkan barakah terhadap ilmu yang di dapatnya dan tidak bermanfaat. Hal tersebut dilakukan karena keyakinan murid terhadap kedudukan guru sebagai penyalur kemurahan tuhan yang dilimpahkan kepada murid-muridnya, baik di dunia maupun di akhirat.

²⁹Imron Arifin, *ibid*, hal- 11

Hubungan ini dipengaruhi oleh literatur pendidikan yang dipakai sebagai acuan di pesantren salah satunya adalah kitab Taklim Al Mutakalim.³⁰

Menurut Geertz kyai dan santri merupakan bagian dari kelompok masyarakat islam khususnya di pulau jawa yang memiliki kesadaran keislaman yang lebih utuh dan lurus dibanding dua kelompok lainnya yaitu abangan dan priyayi. Santri sendiri diidentifikasi merupakan bentukan komunitas kiai, khususnya melalui lembaga pesantrennya.³¹

Antara kiai dan santri terdapat sebuah pola relasi emosional layaknya tradisi feodal, tetapi tanpa struktur dan tingkatan politis. Kyai dan keluarganya memiliki struktur kultural yang tinggi dibanding kaum santri. Menurut Irsan sebagaimana dulas Marijan, bahwa tradisi tersebut bertumpu pada tiga pilar utama yaitu : 1) basis massa yang merupakan pola struktur sosialnya., 2) basis ulama yang merepresentasikan struktur kepemimpinan., dan 3) basis tradisi yang secara kultural menjadi sistem budaya yang mengikat visi keilmuan maupun belbagai etiket keislaman yang mereka anut³². Sistem budaya ini yang merupakan ciri khas terhadap tradisi kyai dan santri, yang mana menjadikan basis massa kyai adalah pesantren dan pedesaan. Hal ini menjadikana kekuatan politik kyai mengakar secara kultural dengan santri menjadi ujung tombak utama.

³⁰Dhofier, Zamakhsyari, *tradisi pesantren: studi tentang pandangan hidup kyai*, 1985, .P3ES, Jakarta, hal 55

³¹Geertz, Clifford, *Op Chit*

³²Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*, 1992, Erlangga, surabaya, hal-28

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman :

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang meletakkan kekuasaan bertumpu pada rakyat, dengan partai politik sebagai instrumen untuk rakyat dalam memberikan hak politiknya terhadap anggota legislatif. Dengan pemilihan umum diharapkan melahirkan pemimpin yang pro rakyat, jujur, bersih, dan melahirkan masyarakat madani.

2. Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan perilaku yang telah menjadi bagian kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendir tanpa bantuan dari manusia lain ataupun dari masyarakat luas. Hubungan ini menjadi alasan utama dalam menarik simpati masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan mendukung partainya untuk meraih hasil yang maksimal dalam pemilihan umum.

3. Budaya Politik

Budaya politik adalah suatu sikap dalam politik dan peranan warga negara dalam berpolitik. Di Indonesia umumnya dan Kabupaten Sumenep khususnya masih bertumpu pada keyakinan, sikap, dan nilai yang menjadi tradisi. Dalam hal

ini di Kabupaten Sumenep yang masih patuh dan tunduk terhadap kyai dan santri sebagai orang yang di muliakan.

4. Politik Santri

Politik santri adalah politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan dalam memberikan dukungan politiknya dalam pemilu legislatif. Agama menjadi indikator dalam menentukan pilihan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini di arahkan pada latar dari individu tersebut secara holistic, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis³³

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus seperti, sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (sayekti pujosuwarno, 1992: 34) yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *qualitative* yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Lebih lanjut sayekti Pujosuwarno mengemukakan pendapat Moh. Surya dan Djumhur yang menyatakan bahwa studi kasus dapat diartikan sebagai suatu tehnik mempelajari seorang individu secara mendalam untuk membantunya memperoleh penyesuaian diri yang baik.

³³Lexy. J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif (edisi Revisi), 2011, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hal-4

Menurut Lincoln dan Guba (dedy Mulyana, 2004: 201) penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keunggulan, yaitu :

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek penelitian.
2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari.
3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas.³⁴

Pada dasarnya penelitian studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam.

2. Unit Analisa Data

Untuk mendapatkan sekaligus mengetahui informasi tentang kinerja politik santri yang mulai memudar dengan menurunnya perolehan suara legislatif Kabupaten Sumenep PKB dan PPP selaku partai yang berbasis islam. Maka peneliti mengambil unit analisa data di Kabupaten Sumenep.

3. Langkah – Langkah Penelitian

Dalam penelitian agar pelaksanaan terarah dan sistematis maka disusun tahapan penelitian, ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu :³⁵

³⁴Mulyana, Dedy., metodologi penelitian kualitatif : paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Bandung : remaja rosdakarya, 2001

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kebutuhan peneliti. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai dilakukan.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek penelitian tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

³⁵oleong., lexy J., *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, Rosda, 2006, hal 127-148

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide).³⁶

Ada 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :

1. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.
2. Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
3. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai H. Abrory Manna, S.Ag. sebagai anggota DPRD Sumenep Fraksi PKB serta ketua ketua komis A. Selain itu dari PKB juga mewawancarai sekretasis DPC yaitu Bpk Bahrul Ulum. Dari PPP peneliti mewawancarai H. Subaidi sebagai sekretaris DPC PPP Sumenep sekaligus anggota DPRD fraksi PPP dan ketua komisi D.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca idera

³⁶Bungin. Burhan, *penelitian kualitatif(komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, jakarta: kencana, 2011,, ED ke-2, hal-111

lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁷

Penelitian ini menggunakan jenis non partisipan dimana peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subjek lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan dilakukan dengan metode observasi terstruktur.

Dalam pengamatan ini peneliti melihat gerak gerak santri dalam memperjuangkan PKB dan PPP di Sumenep menjelang pemilu 2014.

3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, metode ini digunakan untuk menelusuri data historis.

Dalam hal ini peneliti banyak menggunakan *Internet* sebagai penopang peneliti menelusuri rekam jejak santri PKB dan PPP di Sumenep selain data yang di dapat dari DPC PKB dan PPP serta KPU sumenep.

6. Alat Bantu Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan

³⁷Bungin Burhan,. Ibid, hal-118

tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

3. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

7. Keabsahan dan Keajegan Data

Untuk menguji keabsahan data yang di dapat sehingga benar benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut.³⁸

Adapun triangulasi yang digunakan adalah, sebagai berikut :

1. Triangulasi dengan sumber data

³⁸Moleong., lexy J., *op chit*, hal-330

mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan

landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-faktor yang ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelesaian. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi serta dokumentasi. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga

didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

9. Kerangka Pembahasan

Untuk mempermudah proses penulisan skripsi ini, maka penulis merancang sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum ruang lingkup penelitian yang meliputi demografi dan geografi kabupaten sumenep.

Bab ketiga, berisi tentang motivasi keterlibatan santri dalam politik baik secara historis maupun ideologis beserta dinamikanya dalam pemilu 1999, 2004, 2009, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika politik santri tersebut.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.